

TESIS

**AKU ADALAH ALAM: MODEL PELAPORAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBASIS KEARIFAN
SUKU KAJANG**

***I AM A NATURE: A BIODIVERSITY REPORTING MODEL
BASED ON THE VALUES OF LOCAL
WISDOM OF KAJANG TRIBE***

NURUL RUSDIANSYAH

A062191007



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

AKU ADALAH ALAM: MODEL PELAPORAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBASIS KEARIFAN SUKU KAJANG

I AM A NATURE: A BIODIVERSITY REPORTING MODEL BASED ON THE VALUES OF LOCAL WISDOM OF KAJANG TRIBE

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister
disusun dan diajukan oleh

NURUL RUSDIANSYAH

A062191007



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

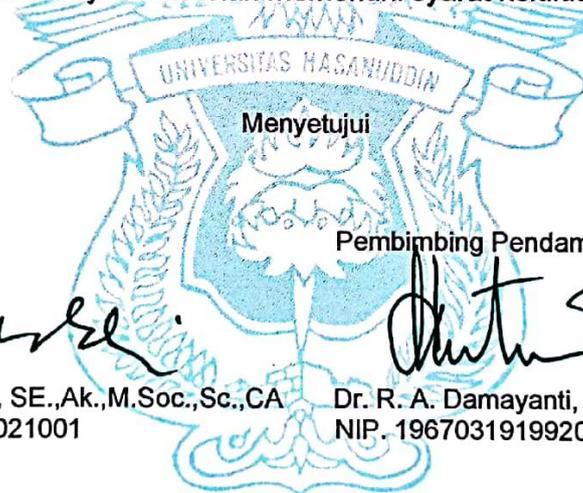
TESIS

AKU ADALAH ALAM: MODEL PELAPORAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBASIS KEARIFAN SUKU KAJANG

disusun dan diajukan oleh

Nurul Rusdiansyah
A062191007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin
pada tanggal 25 Mei 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Syarifuddin, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA
NIP. 196312101990021001


Dr. R. A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.Sc.,CA
NIP. 196703191992032003

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. R. A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.Sc.,CA
NIP. 196703191992032003



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM
NIP. 196503201992032002

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Rusdiansyah
NIM : A062191007
Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul

**AKU ADALAH ALAM: MODEL PELAPORAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
BERBASIS KEARIFAN SUKU KAJANG**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 254 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



**Nurul Rusdiansyah
NIM. A062191007**

PRAKATA

Tiada kata yang sepatutnya diucapkan selain *alhamdulillah* sebagai wujud rasa syukur atas segala limpahan kasih sayang dan rahamat-Nya kepada setiap insan yang kerdil nan berselimutkan dosa. Terima kasih wahai Sang Esa yang mulia dengan segala keagungan-Mu, kasi sayang-Mu, dan kekuatan-Mu yang telah Engkau anugerahkan, yang menghantarkan penulis sampai pada titik terakhir dalam penyelesaian tesis ini yang merupakan sebuah perkara wajib untuk memperoleh gelar akademik Magister Akuntansi (M.Ak) pada program pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hasanuddin.

Terima kasih kepada para dosen pembimbing bapak Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA dan Ibu Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc. Sc., CA yang telah berkenan dan ikhlas meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing, mentransfer ilmu serta berdiskusi dengan penulis yang fakir ilmu ini. penulis menyadari tanpa peran mereka maka karya ilmiah ini akan hanya menjadi sebuah sampah yang tak berguna. Untuk itu, hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis mampu berikan, dan semoga keikhlasannya atas abadinya beroleh amal jariyah.

Terima kasih-Ku juga kepada para teman-teman yang membantu penulis di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Sungguh kebaikan dan keikhlasan untuk penulis repotkan adalah salah satu faktor utama suksesnya sebuah karya ilmiah ini yang menghantarkan penulis untuk bergelar magister akuntansi. Selain itu, terima kasih juga kepada informan yang dengan senang

hati melayani banyaknya pertanyaan dari penulis sampai data yang dikumpulkan sudah dirasa cukup.

Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, Ketua Program Studi Magister Akuntansi Ibu Dr. R. A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.Sc.,CA serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman kadir, SE., M.Si. Ucapan terima kasih kepada para penguji, Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., Ak., MS.,C A, Bapak Dr. Darwis Said, SE., Ak., M.SA, dan Bapak Dr. Asri Usman, SE., Ak., M.Si., CA, yang telah memberikan kritik dan saran kepada peneliti untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, kerabat, teman seperjuangan atas motivasi dan dukungan yang diberikan selama penelitian tesis ini. semoga seluruh pihak mendapat kebaikan dari yang mahas Esa atas bantuannya hingga tesis ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, yang disebabkan oleh kurangnya ilmu dan wawasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 25 Mei 2021

Penulis,

Nurul Rusdiansyah

A062191007

ABSTRAK

NURUL RUSDIANSYAH. *Aku Adalah Alam: Model Pelaporan Keanekaragaman Hayati Berbasis Kearifan Suku Kajang* (dibimbing oleh Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti).

Penelitian ini bertujuan mengkritisi filosofi laporan keanekaragaman hayati pemerintah daerah dan mendekonstruksi dengan mengekstraksi nilai-nilai kearifan lokal suku Kajang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pelaporan keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal suku Kajang menekankan pada aspek sosial, spiritual, moral, budaya, dan lingkungan yang dibangun dari nilai-nilai seperti: *tarekat, siurangi linoa, appadai pallinoanga, ta'buka, addili, acciddong sipangupa bicara, dan kuntotojeng*. Implikasi penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah menggali lebih dalam motif dan narasi dalam laporan keanekaragaman hayati dan kerja sama warga dalam merespon kondisi lingkungan. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi model bagi pembuat kebijakan dalam menyusun laporan keanekaragaman hayati.

Kata kunci: dekonstruksi, kearifan lokal, pelaporan keanekaragaman hayati, keberlanjutan, akuntansi lingkungan



ABSTRACT

NURUL RUSDIANSYAH. *I am a Nature: A Biodiversity Reporting Model Based on the Values of the Local Wisdom of Kajang Tribe (Syarifuddin and Ratna Ayu Damayanti)*

The aims of this research are to criticise the philosophy of local government biodiversity report and to deconstruct it by extracting the values of local wisdom of the Kajang tribe.

This research used qualitative study with the deconstruction approach of Jacques Derrida.

The results show that the Kajang's tribe local wisdom-based biodiversity reporting model emphasises social, spiritual, morals, cultural, and environmental aspects, derived from the values such as *tarekat*, *siurangi linoa*, *appadai pallinoanga*, *ta'buka*, *addili*, *acciddong sipangupa bicara*, *kuntotojeng*. The implications of this research for further researchers are to explore more deeply the motives and narratives in biodiversity report and to cooperate with the community in responding the environmental conditions. In practical terms, it could become a model for policymakers in preparing a biodiversity report.

Key words: deconstruction, local wisdom, biodiversity sustainability, environmental accounting



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN..... | iv |
| PRAKATA..... | v |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Konteks Penelitian | 1 |
| 1.2. Pertanyaan Penelitian | 12 |
| 1.3. Misi Penelitian..... | 12 |
| 1.4. Utilitas Penelitian..... | 13 |
| BAB II LANDASAN PEMIKIRAN | 14 |
| 2.1. Menggongcang Pelaporan Keanekaragaman Hayati..... | 14 |
| 2.2. Model dan Penerapan <i>Accounting Biodiversity</i> | 15 |
| 2.3. Urgensi Akuntansi Keanekaragaman Hayati | 19 |
| 2.4. Aku adalah Alam..... | 20 |
| 2.5. Ilmu Pengetahuan Dalam Sentimen Postmodernisme..... | 21 |
| 2.6. Sekelumit Dekonstruksi Derrida..... | 23 |
| 2.7. Suku Kajang dan Alam..... | 25 |
| 2.8. Kerangka Pemikiran..... | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| 3.1. Setting Penelitian..... | 28 |
| 3.2. Jenis Dan Sumber Data | 32 |
| 3.2.1. Jenis Data..... | 32 |
| 3.2.2. Sumber Data..... | 32 |
| 3.3. Proses Menghimpun Kepingan informasi..... | 33 |
| 3.3.1. Instrumen..... | 33 |
| 3.3.2. Situs..... | 33 |

| | |
|---|----|
| 3.3.3. Teknik dalam mengumpulkan data | 36 |
| 3.4. Teknik Analisis Data | 37 |
| 3.4.1. Reduksi Data.. | 39 |
| 3.4.2. Penyajian Data | 39 |
| 3.4.3. Menguji Keabsahan | 40 |

BAB IV SEPENGGAL KISAH MENAPAK JEJAK: RUNTUNAN PERUBAHAN KAKI BERPIJAK DI BUMI TANAH TOA.....41

| | |
|--|----|
| 4.1. Secangkir Kopi Toraja: Penengah Kekacauan Dalam Benak..... | 41 |
| 4.2. Ketika Malam Turun Di Bulukumba: Menyusun Strategi Masuk Ke Situs Penelitian..... | 43 |
| 4.3. Asam Garam Menghimpun Kepingan-kepingan Informasi Di Tanah Toa..... | 47 |
| 4.4. Potret Situs Penelitian Kawasan Hutan Adat Amma Toa Kajang | 51 |

BAB V LOGOS KAPITALISME: KUASA DAN ILUSI MORAL54

| | |
|---|----|
| 5.1. Bayang-Bayang “Hantu” Kapitalisme: Distorsi Kesadaran Individu | 54 |
| 5.2. Konsep Keberlanjutan Sebagai Hijab Kapitalis | 56 |
| 5.3. Kapitalis Menciptakan Kiamat Bagi Umat Manusia | 62 |
| 5.4. Benturan Kepentingan Pengelolaan Lingkungan | 64 |
| 5.5. Kapitalisme: Modernisme atas Alam | 67 |
| 5.6. Dekonstruksi <i>Value Pelaporan Biodiversity Accounting</i> | 70 |
| 5.7. Nilai Alam bagi Suku Kajang..... | 72 |

BAB VI PELAPORAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH: KRITIK DAN JALAN TERANG MENUJU PENGUNGKAPAN BERBASIS FILOSOFI KEARIFAN LOKAL SUKU KAJANG75

| | |
|---|----|
| 6.1 Penilaian Dan Pelaporan Modal Alam..... | 75 |
| 6.2. <i>A Good Governance For Ecological Sustainability</i> | 83 |
| 6.3. Identifikasi Makna Alam Pada Masyarakat Adat Kajang..... | 86 |

BAB VII KONSTRUKSI KONSEP LAPORAN KEANEKARAGAMA HAYATI.....91

| | |
|---|----|
| 7.1. Filosofi Praktik Pelaporan Keanekaragaman Hayati Pada Masyarakat Adat Amma Toa Kajang..... | 91 |
|---|----|

| | |
|--|------------|
| 7.1.1. <i>Kuntotojeng</i> atau <i>Lambusu</i> (Perilaku yang senantiasa menyandarkan pada Passang Ri Kajang atau Pesan Leluhur)..... | 91 |
| 7.1.2. <i>Tarekat / Siurangi Linoa</i> (Filosofi Penyatuan Diri dengan Alam)..... | 98 |
| 7.1.3. <i>Ta'buca</i> (Filosofi Senantiasa Terbuka atau Berkata Apa Adanya). | 102 |
| 7.1.4. <i>Appadai Pallioanga</i> (Filosofi Hidup yang Selaras dengan Alam) | 105 |
| 7.1.5. <i>Acciddong Sipangupa Bicara</i> dan <i>Addili</i> (Filosofi Terkait nilai demokrasi dan Keadilan)..... | 108 |
| 7.2. Konsepsi Pelaporan Biodiversity Ala Derrida | 114 |
| 7.3. Nilai-nilai Kearifan Lokal Penguat Karakter Bangsa..... | 123 |
| 7.4. Konsep Pelaporan Biodiversity Suku Kajang | 126 |
| 7.5. Model Pelaporan Biodiversity yang Diturunkan Dari Nilai-nilai Kearifan Lokal Suku Kajang..... | 129 |
| 7.6. Sintesis: Sustainability Development untuk Masa Depan Generasi | 132 |
| BAB VIII PENUTUP | 137 |
| 8.1. Kesimpulan..... | 137 |
| 8.2. Implikasi Penelitian..... | 139 |
| 8.3. Keterbatasan Penelitian | 140 |
| 8.4. Saran Untuk Riset Selanjutnya | 140 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 142 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 6.1. Identifikasi Karakteristik Laporan Keanekaragaman Hayati Pemerintah Daerah..... | 82 |
| Tabel 6.2. Integrasi Metafora-metafora dengan Pengelolaan Alam dan Keanekaragaman hayati..... | 89 |
| Tabel 7.1. Identifikasi Aspek Filosofis dalam Praktik Pelaporan Keanekaragaman Hayati Masyarakat Adat Kajang..... | 114 |
| Tabel 7.2. Value Pelaporan Biodiversity..... | 132 |
| Tabel 7.3. Biodiversity dan Perlindungan Atas Biodiversity..... | 132 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Ilustrasi 2.1 Skema Kerangka Konseptual..... | 30 |
| Ilustrasi 7.1. Konsep Pelaporan Keanekaragaman Hayati Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kajang..... | 117 |
| Ilustrasi 7.2. Konstruksi Model Penyusunan Pelaporan Keanekaragaman Hayat Pemerintah Daerah..... | 125 |
| Ilustrasi. 7.3. Pertanggung Jawaban Kepada Stakeholder atas Alam oleh Suku Kajang..... | 129 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Keanekaragaman hayati merupakan elemen penting dalam kehidupan di Bumi. Keanekaragaman hayati mencerminkan adanya keberagaman organisme flora dan fauna yang semuanya adalah bagian dari bumi yang beragam secara biologis (Syarifuddin dan Damayanti, 2019; Gaia dan Jones, 2017). Meski kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati telah diupayakan dari berbagai perspektif, akan tetapi masih terdapat kekurangan pada kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati (*Union for Ethical Bio Trade*, 2016). Lemahnya kesadaran ini adalah salah satu faktor penghalang paling serius dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati (*Convention on Biological Diversity*, 2010). Akibatnya, krisis keanekaragaman hayati terus meningkat secara global dan berada pada level kronis karena aktivitas eksploitasi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, kepentingan pribadi dan kelompok (Butchart *et al.*, 2010; TEEB, 2010; Sizemore, 2015; Kumar, 2010), sehingga keberadaan sumber daya menipis (Shandra *et al.*, 2010) karena penggunaan yang berlebihan bukan untuk pelestariannya (Gunnar dan Kristina, 2013).

Literatur tentang studi akuntansi keanekaragaman hayati terbilang baru, akan tetapi terus mengalami perkembangan (Syarifuddin dan Damayanti, 2019).

konsep akuntansi keanekaragaman hayati yang diusulkan oleh Jones (1996) yang diterbitkan oleh *British Accounting Review*, mengusulkan model inventarisasi modal alam dengan tujuan memberikan kerangka kerja yang komprehensif, dan hal itu penting untuk tujuan pengelolaan sumber daya dan konservasi (Siddiqui, 2013). Perkembangan riset saat ini mendorong para peneliti untuk melakukan analisis atau penilaian, pengukuran, pengujian dan evaluasi pelaporan terhadap keanekaragaman hayati seperti (Hossain, 2017; Cuckston, 2013; Ferreira, 2015; Turak *et al.*, 2017; Skouloudis *et al.*, 2019) dan yang berfokus pada pelaporan keanekaragaman hayati dalam disiplin akuntansi (Jones, 1996, 2003; Jones dan Matthews, 2000; Syarifuddin dan Damayanti, 2019; Samkin dan Schneider, 2010; Samkin *et al.*, 2014; Cuckston, 2018; Liempd dan Bush, 2013; Boiral, 2016).

Penelitian tentang pelaporan keanekaragaman hayati ini, mencoba untuk menggali aspek filosofis pelaporan keanekaragaman hayati pemerintah daerah melalui pendekatan dekonstruktif, yang termotivasi dari Liempd dan Busch (2013), Syarifuddin dan Damayanti (2019) yang mengembangkan argumen filosofis pelaporan keanekaragaman hayati yang cenderung pada filosofi antroposentris. Dekonstruksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekonstruksi ala Jacques Derrida yang pada dasarnya bertujuan untuk mendobrak cara pandang yang terpusat dalam teks. Sebagaimana yang diungkapkan (Kamayanti, 2016) bahwa dekonstruksi menolak teks memiliki arti yang stabil, dan Norris (2016) cita-cita dekonstruksi adalah mengungkap kegagalan dari tujuan menampilkan hakikat secara mutlak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membongkar paradigma antroposentris-

kapitalisme dalam pelaporan keanekaragaman hayati sebagai bentuk revolusi penyelamatan ekologi.

Logosentris (kapitalisme) dalam pelaporan keanekaragaman hayati menjadikan pelaporan keanekaragaman hayati hanya sebagai formalitas. Formalitas keanekaragaman hayati sebagaimana yang diisyaratkan oleh Houdet *et al.* (2012), Heniwati dan Asni (2019), Grabsch *et al.* (2011), Liempd dan Busch (2013), Rimmel dan Jonäll (2013) bahwa pelaporan keanekaragaman hayati sekedar dipandang sebagai formalitas, dan masih jauh dari kesungguhan untuk menjadikan laporan tersebut untuk pengambilan keputusan sebagai respon atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang cenderung tidak terkendali dan lingkungan akan terus mengalami degradasi. Formalitas itu juga diungkapkan oleh (Liempd dan Busch, 2013; Rimmel dan Jonall, 2013) bahwa perusahaan-perusahaan Belanda yang tersebar di beberapa negara seperti Skandinavian, Denmark dan Swedia masih pada level yang sangat rendah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan pelaporan keanekaragaman hayati yang ditunjukkan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia seperti Kabupaten Gowa, DKI Jakarta, Semarang dan Surabaya (Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gowa, 2018; DKI Jakarta, 2018; Semarang, 2017; Surabaya, 2018), yang masih sebatas dokumentasi saja. Oleh karena itu maka logos yang melekat dalam pelaporan keanekaragaman hayati perlu untuk didekonstruksi sebagai pembebasan dari keterkekangan, mengkonstruksi pelaporan keanekaragaman hayati dari perspektif nilai-nilai kearifan lokal suku Kajang.

Penarikan nilai-nilai kearifan lokal suku Kajang untuk disandingkan dengan logosentris kapitalisme dengan segala pilarnya dipandang sangat

relevan. Hal ini karena konsep berelasi dengan alam oleh suku kajang dimana alam adalah diri sendiri, dan harus dihargai layaknya seorang ibu yang harus di hormati dan dilindungi (Ahuluheluw, 2018). Konsep inilah yang menjadi landasan utama bagi masyarakat Kajang dalam membangun relasi dengan alam untuk kehidupan yang arif. Keunikan lainnya adalah Filosofi warna hitam yang setiap saat digunakan oleh masyarakat kajang menandakan konsep hidup bersahaja, sederhana, kesamaan atau kesetaraan antar seluruh anggota masyarakat. Kekuatan filosofi ini tentu menciptakan kesamaan pandangan dalam menyikapi keadaan lingkungan yang menjadi kewajiban untuk dijaga dan dilestarikan.

Pencegahan terhadap rusaknya kelestarian lingkungan pada masyarakat suku Kajang, ditandai dengan pemberian sanksi adat kepada masyarakat jika melakukan penebangan pohon secara liar, karena mereka percaya bahwa menebang pohon secara liar akan mengakibatkan rusaknya lingkungan dan membuat *Turiek Arakhna* (Turi Arakna) murka. Kemurkaan-Nya akan membawa kutukan bagi masyarakat Kajang. Kutukan itu dapat berupa penyakit bagi orang yang merusak hutan, atau bencana yang akan menimpah masyarakat Kajang. Kepercayaan itu secara turun temurun telah membumi di tanah Kajang, sebab *Pasang Ri Kajang* adalah pesan atau amanah leluhur yang sakral dan wajib untuk dipatuhi yang bila mana tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak buruk pada masyarakat Amma Toa (Kajang), misalnya rusaknya keseimbangan sistem sosial dan ekologi (Asyrafunnisa dan Abeng, 2019).

Syarat pengelolaan lingkungan sebagaimana *Global Sustainability Standards Board* (GRI 103, 2016) ungkapkan bahwa organisasi harus mengungkapkan pendekatan manajemennya terhadap kepatuhan lingkungan,

pengungkapan asuransi liabilitas lingkungan, komitmen organisasi dalam melakukan pengelolaan berdasarkan kepatuhan aturan, dan pengungkapan pengalokasian sumber daya seperti manusia, keuangan, dan teknologi yang digunakan, maka dari itu laporan keanekaragaman hayati semestinya menjadi basis kontrol pengelolaan lingkungan yang harus diwujudkan dalam implikasi kebijakan atau perundang-undangan. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Khan (2014) dalam riset yang dilakukan di Kalimantan, menegaskan bahwa kombinasi antara pemantauan dan pelaporan diterapkan dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan memastikan transparansi yang lebih besar dan memberikan informasi yang lebih rinci tentang keanekaragaman hayati. Artinya bahwa pelaporan keanekaragaman hayati sejatinya adalah sebuah instrumen untuk melindungi terjadinya krisis lingkungan maupun krisis keanekaragaman hayati.

Duka Pertiwi kala keberadaan keanekaragaman hayati tertumbuk pandangan menduduki fase keterpurukan secara global. Hal tersebut menandakan bahwa akal budi yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus ketamakan dan ketiadaan penyatuan Tuhan dengan jiwa adalah penyebab. Kemudian nurani terbesit tanya akan alam (aku) esok yang tampaknya telah lelah disuguhkan keserakahan, kemunafikan dan kejahatan manusia kepada alam (aku) yang tak bersudah. Sungguh, alam (aku) menjerit tanpa daya atas luka yang sengaja, tak ingin harapan pupus karena nafsu ambisius manusia mengeruk alam (aku), untuk bersaksi atas keindahan daun-daun menari, lembut dan anggun; burung-burung berkicau bersahut-sahutan, dan alam hijau yang terpapar sinar keemasan untuk hidup yang sentosa. Namun bila ego menjadi Tuhan, maka yang lain menjadi taruhan.

Melihat kondisi hari ini maka tak dapat dipungkiri bahwa keindahan dan lestari alam mulai masuk dalam lembar kenangan, punah dan mati menggantikan, sebab angkara manusia. Materi terus dicari, emas tak sudah digali, demi kelarutan dalam keuntungan dan hadiah Tuhan pun mubazir. Padahal baik manusia dan alam merupakan realitas yang berasal dari realitas yang absolut. Alam dan manusia merupakan tempat manifestasi Ilahi (*AKU*) (Kusdewanti *et al.*, 2016). Maka dari itu, perlu diketahui bahwa kosmos adalah transkripsi dari "*AKU*" yang absolut, atas bentuk Zat maha benar begitu pula manusia adalah transkripsi kehadiran "*AKU*", karena diciptakan atas bentuk Allah dan merefleksikan semua nama Ilahi (Murata, 1999). Kesadaran mutlak harus dibangkitkan bahwa keanekaragaman hayati adalah unsur yang diamanatkan dalam menjaga keindahan yang terukir alami tanpa bumbu kepalsuan, untuk keberlangsungan hajat hidup manusia di dunia fana ini, dan salah satu *asset* alam yang memikul beban tanggung jawab atas keseimbangan dan kestabilan ekonomi. Lalu kemudian perkara baru pun bertunas di lahan kesadaran manusia yang tidak lagi subur terhadap persoalan ekologis, di mana kekayaan alam adalah keuntungan ekonomi untuk penyempurnaan takhta, maka bayarannya adalah alam diperas secara brutal sebagai pemuas belaka untuk jiwa yang materialistik kapitalis.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (Boiral, 2016) yang menyebutkan bahwa kebinasaan berbagai spesies alam menunjukkan peningkatan secara masif. Salah satu akar utama dari fenomena ini adalah simanya teritori non-manusia yang ditengarai sebuah aksi pentadbiran sang jagat dimana kaidah *sustainability* tidak terbentang (Sizemore, 2015). Hubungan manusia dan alam acap kali diabaikan hingga pada akhirnya berada pada

tampak kegagalan tanggung jawab dalam merawat alam sebagai *khalifah* Allah di bumi (Rahem, 2014). Tentu hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari makna yang terkandung di dalam Undang-undang dasar pasal 33 ayat (3), di mana kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu hal tersebut menjadi portal masuk hantu-hantu kapitalis yang menjadi dasar dalam memantulkan bayangan aksi pembobolan lingkungan secara sempurna untuk di manfaatkan atas nama kemakmuran, maka “penguasa” yang dipersenjantai kewenangan pengendali, bebas mengatur pengelolaan lingkungan yang berbentuk izin sebagai syarat administrasi di mana celah ladang korupsi terbuka. Akibatnya adalah alam menjadi korban atas kezaliman administrator, yang tentunya sangat bertentangan dengan nilai manusia sebagai mandataris Allah Swt yang harus mengenal dirinya, untuk mengenal alam bahwa mereka adalah satu dalam ikatan ciptaan, dan menyelami alam penyucian diri untuk mengaktualkan aksi mendaulat nilai kesaksamaan demi manusia dan alam yang sentosa (Tjokroaminoto, 2019).

Tindakan destruktif terhadap alam adalah menghancurkan peradaban manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia sejatinya berikhtiar memahami hakikat alam, dan fungsinya bagi kehidupan. Alam dan manusia adalah satu, maka makna yang harus dipahami adalah sebagai nikmat dan *masterpiece of God* sehingga wajib untuk dipelihara dengan penuh kasih sebagai bentuk kealiman kepada sang maha cipta (Wilujeng, 2014; Reflita, 2015), karena Tuhan mengadakan bumi dengan segenap isinya untuk kepentingan ciptaan-Nya, akan tetapi dalam pendayagunaan alam mesti beretika lingkungan demi terjaganya keseimbangan (Wantoro, 2012). Sebagaimana Adam Smith (Koesters, 1987)

mengemukakan bolehnya eksploitasi lingkungan asalkan sesuai ridha sang Ilahi. Artinya adalah tetap mempertahankan kaidah-kaidah lingkungan.

Krisis lingkungan terjadi ditengarai dari kemunculan aliran filsafat antroposentrisme yang merasuki kejiwaan manusia (Abdillah, 2014). Konsep yang dibawa antroposentrisme adalah meniadakan Tuhan sebagai pusat kehidupan, melainkan manusia, sebagai penguasa realitas maka nasib manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Oleh sebab itu, mengabadikan logika aposentrisme adalah siasat untuk mendayagunakan alam, karena penyakit animo yang tak terpuaskan, manusia dengan daya pikirnya selalu berupaya untuk membanjiri kepuasan hasratnya dengan gagasan yang bervariasi yang mengindikasikan eksploitasi (Solichin, 2019), karena antroposentrisme adalah ideologi utama yang mengubah hubungan manusia dan alam (Zimmerman, 2014). Disisi lain, degradasi lingkungan juga terjadi karena implikasi manusia modern dan liberal yang memandang bahwa developmentalisme adalah indikator evolusi ekonomi untuk menaksir standar dan kualitas hidup, (Hartati, 2012). Manusia *homo economicus* dalam kuasa mazhab neoliberalisme digunakan sebagai narasi untuk menggapai hajat yang tak bermartabat. Sehingga lingkungan, sosial dan budaya adalah korban dari narasi itu, karena *homo economicus* menafsirkan manusia sebagai insan yang memaksimalkan kesentosaan dirinya sendiri (Fordebi, 2018).

Paradigma yang menempatkan manusia adalah pusat alam semesta semata wayang, membawa bencana tersendiri bagi kesejahteraan alam. Hal tersebut diawali dari paradigma *cogito ergo sum* yang dipopulerkan oleh Rene Descartes menciptakan konotasi bahwa kehadiran alam diakui sejauh mana manusia memikirkannya. Sehingga manusia menganggap dirinya terpisah dari

alam dan bersikap eksklusif, subordinat dan dominative (Segu, 2016), maka kemudian yang terjadi adalah manusia melupakan dimensi teosentris dalam berelasi dengan alam. Alam itu menyanggah nilai intrinsik, sehingga dalam akuntansi nilai intrinsik seringkali difokuskan untuk penjurian terhadap alam, (Heniwati dan Asni, 2019; Liempd dan Busch, 2013). Namun, akuntan tampak lebih mendukung penggunaan pendekatan antroposentrisme untuk mengasosiasikan ekologi dan ekosistem, pada akhirnya manusia dipandang sebagai yang paling berharga dan bernilai, sehingga lingkungan hadir hanya diperuntukkan sebagai pelayan kepentingan semata (Russell *et al.*, 2017; Yasser, 2014). Padahal manusia dan alam adalah manifestasi kreasi Tuhan.

Akuntan memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dan pemantauan. Akuntan memiliki peran yang sangat besar dalam perhitungan biaya pelestarian keanekaragaman hayati dalam akuntansi keanekaragaman hayati. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi akuntan dalam mengembangkan keterampilan profesi (Chairina dan Fitriaty, 2017). Oleh karena itu profesionalisme akuntan tidak melibatkan paradigma antroposentrisme dalam menilai keanekaragaman hayati, akan tetapi mengedepankan etika-etika lingkungan yang dapat diimplementasikan ke dalam wujud pelaporan keanekaragaman hayati, sebagai investigasi masalah besar yang perlu diselidiki lebih luas untuk setidaknya dua alasan utama yang saling terkait: keseriusan masalah keanekaragaman hayati, dan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan aksi pemantauan (Boiral, 2014). Hal tersebut sebagaimana (Milne dan Gray 2013; Milne 1996) mengatakan bahwa rilis informasi yang andal mengenai keanekaragaman hayati melalui pelaporan sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi, meskipun analisis dan

pelaporan keanekaragaman hayati masih memerlukan pendekatan global yang melampaui lingkup kendali organisasi.

Accounting for biodiversity merupakan sebuah kendaraan yang digunakan untuk memantau dan menanjakkan kesadaran atas impresi manusia terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini senada dengan yang diungkapkan (Remme *et al.*, 2016) bahwa akuntansi keanekaragaman hayati berhajat untuk menaksir, meninjau, dan melukiskan suatu modifikasi sistemis dalam heterogenitas keanekaragaman hayati, sebagai konstituen integral dari sistem laporan ekosistem yang lebih dominan. Olehnya akuntansi keanekaragaman hayati harus merefleksikan kondisi dan pertimbangan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Schroter *et al.* (2013) menandakan bahwa dibutuhkan suatu pemahaman pengelolaan keanekaragaman hayati dan kapasitasnya untuk keberlanjutan penggunaan keanekaragaman hayati dan pengembangan laporan keanekaragaman hayati, maka resolusi dari persoalan di atas adalah laporan akuntansi keanekaragaman hayati harus memonitor pendistribusian dan ancaman keanekaragaman hayati dan mempromosikan kesadaran publik atas pentingnya keanekaragaman hayati (Thomson, 2014)

Hal utama sebelum memfardukan formula jempolan untuk menilai dan melaporkan keanekaragaman hayati adalah dengan cara apa untuk mengidentifikasinya, bagaimana mengetahui apakah keanekaragaman hayati telah bersilih. Sebab persoalan identifikasi dan penilaian keanekaragaman hayati sangat erat sangkut pautnya dengan pelaporan dan pemantauan (Cipullo, 2016). Oleh sebab itu, maka pelaporan keanekaragaman hayati harus menjadi garda terdepan dalam pengungkapan kondisi *unknown stakeholder* yang juga menuntut kesejahteraannya, sebagaimana (Milne dan Gray 2013; Milne 1996) mengatakan

bahwa rilis informasi yang andal mengenai keanekaragaman hayati melalui pelaporan sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi, terlebih lagi saat ini marak konflik ekonomi di bidang pertambangan yang menciptakan peluang penghancuran habitat yang berharga dengan mengatasnamakan kata “pertumbuhan ekonomi”.

Akuntansi keanekaragaman hayati dalam konsepsi Maroun dan Atkins (2018) mengiktikadkan sebagai sarana pelaporan risiko terkait keanekaragaman hayati yang memproduksi keinsafan pentingnya mengelola keanekaragaman hayati dengan cara yang ideal, maka dengan demikian fungsi akuntansi diharapkan bisa menjadi agen kesejahteraan manusia maupun non manusia dan proyek emansipatoris untuk kemajuan dalam pola berpikir (Gallhofer dan Haslam, 2003). Oleh karena itu visi narasi pelaporan keanekaragaman hayati adalah untuk mencegah kepunahan dan menambah kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati melalui pengungkapan-pengungkapan yang rinci yang sebagaimana kita ketahui bahwa pentingnya perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati adalah fondasi bagi kehidupan.

Ada berbagai riset yang berkaitan dengan bahasan pelaporan biodiversity, seperti Heniwati dan Asni (2019), yang menyimpulkan bahwa riset tersebut sebagai titik awal keterlibatan lebih mendalam terkait isu-isu keanekaragaman hayati, karena pengungkapan-pengungkapan dalam pelaporan belum mencerminkan prinsip *deep ecology*, akan tetapi riset tersebut hanya sebagai kerangka kerja implementatif untuk laporan keberlanjutan industry. Selain itu, riset Maroun dan Atkins (2017), juga tidak melakukan banyak eksplorasi untuk mengkonfirmasi rekomendasi normatif, misalnya wawancara mendalam, memasukkan GRI untuk evaluasi kegunaan kerangka akuntansi

keanekaragaman hayati. Sedangkan Samkin *et al.* (2017), menemukan bahwa upaya mengevaluasi cadangan hutan secara lazim adalah nilai-nilai yang ditafsirkan untuk tujuan akuntansi yang dibentuk sesuai dengan kerangka kerja yang mirip dengan nilai penyusutan akuntansi, akan tetapi riset tersebut tidak memperhitungkan hilangnya keanekaragaman hayati secara memadai. Sistem dan kerangka kerja akuntansi seharusnya dikembangkan untuk memenuhi tujuan ini melalui kolaborasi dengan bidang lain untuk mencapai sinergi dalam mencapai ketepatan nilai-nilai.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba untuk menambal jejak-jejak keretakan dengan metode dekonstruksi yang ditinjau dari konsep kearifan lokal suku Kajang. Serpihan alasan telah terlontar sehingga bisikan muncul untuk peneliti mengambil judul “Aku Adalah Alam: Model Pelaporan Keanekaragaman Hayati Berbasis Kearifan Suku Kajang”. Tentu, terselip cita-cita yang besar akan kebangkitan kesadaran seluruh umat, betapa pentingnya keanekaragaman hayati dan lingkungan; mendekonstruksi pelaporan keanekaragaman hayati sebagai upaya menuju cita-cita lingkungan yang mencerminkan kearifan lingkungan yang paripurna.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka muncullah pertanyaan utama dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana konstruksi pelaporan keanekaragaman hayati dari perspektif nilai kearifan suku Kajang?

1.3. Misi Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk medekonstruksi pelaporan keanekaragaman hayati yang dinilai memiliki cara pandang yang terpusat, yaitu antroposentris-kapitalis sehingga hanya

mendorong upaya dokumentasi untuk kepentingan profit. Bentuk aksi revolusi penyelamatan lingkungan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan lingkungan yang bersandar pada kepatuhan aturan serta kaidah-kaidah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

1.4. Utilitas Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat yang memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menambah butir-butir wawasan dan menumbuhkan kesadaran bahwa alam adalah organ yang berada di luar tubuh manusia dan memberikan pemaknaan atas dekonstruksi pelaporan keanekaragaman hayati yang dapat menghantarkan pada spirit mencintai alam harus digalakkan untuk mencapai lingkungan yang arif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi suatu rujukan bagi makhluk akademis untuk membentangkan pemahaman relasi antara Tuhan, manusia dan alam yang dijelaskan melalui akuntansi, dan mengembangkan laporan keanekaragaman hayati yang lebih mendalam.

Secara praktis, masyarakat diharapkan dapat memberi tetesan pengetahuan mengenai laporan keanekaragaman hayati bagi pembaca. Selain dari pada itu, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan maupun pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pengelolaan lingkungan untuk mencegah rusaknya lingkungan agar habitat keanekaragaman hayati tetap lestari.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

2.1. Menggongcang Pelaporan Keanekaragaman Hayati

Melindungi adalah pilar utama kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Model pelaporan yang selama ini menjadi kitab suci baik pemerintah maupun sektor swasta dalam pelaporan keanekaragaman hayati masih belum menempatik kedudukan yang paripurna, sebab sifatnya terbatas pada dokumentasi atau inventarisasi. Ketidakberhasilan ini dalam menampilkan pelaporan keanekaragaman hayati sebagaimana yang diisyaratkan dalam prinsip-prinsip etika lingkungan, justru dibumikan oleh korporasi bahkan pemerintah sendiri. Oleh karena itu menjadi keharusan untuk menggongcangnya melalui dekonstruksi. Norris (2016) menuturkan bahwa kegagalan dalam upaya menghadirkan suatu kebenaran absolut merupakan keinginan dekonstruksi dan juga untuk menelanjangi agenda-agenda yang tersembunyi yang mengandung kelemahan dan kepincangan dibalik teks-teks.

Pelaporan keanekaragaman hayati sejatinya tidak terbatas pada fungsi dokumentasi ataupun pendataan semata, akan tetapi berperan sebagai pedoman yang memuat pengungkapan-pengungkapan yang berbasis etika dan aktif dalam mempengaruhi perilaku baik itu manusia, organisasi maupun pemerintah sekaligus dalam mengelola lingkungan dan isinya. Selain itu, jauh lebih penting adalah laporan keanekaragaman hayati menjadi basis kontrol pengelolaan lingkungan yang harus diwujudkan dalam implikasi kebijakan atau perundang-undangan.

Ketika antroposentrisme tumbuh subur sebagai dasar dalam berperilaku, maka aset-aset alam akan senantiasa dijadikan sebagai objek keserakahan yang seyogyanya dapat menghancurkan dunia alami dan keanekaragaman hayati. Kepunahan merupakan dampak buruk dari krisis keanekaragaman hayati yang sulit untuk dipulihkan (Cipullo, 2016). Khan (2014) dalam risetnya menegaskan bahwa kombinasi antara pemantauan dan pelaporan diterapkan dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan memastikan transparansi yang lebih besar dan memberikan informasi yang lebih rinci tentang keanekaragaman hayati. Hal tersebut dapat menghadirkan suatu pemaknaan bahwa bila pelaporan keanekaragaman hayati yang tidak mengedepankan transparansi maka suatu tindakan “kreatif” mungkin saja terjadi, dan tujuan perlindungan keanekaragaman hayati tidak akan tercapai. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat masif terjadi. Oleh karena itu sistem pelaporan keanekaragaman hayati harus dievaluasi dalam hal pertanggungjawaban dan transparansi dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan laporan keanekaragaman hayati harus *comprehensive* dan *up to date*.

2.2. Model dan Penerapan *Accounting Biodiversity*

Peneliti seperti Samkin, Schneider dan Tappin (2014) melihat perkembangan kerangka pelaporan dan evaluasi keanekaragaman hayati di Selandia Baru. Mereka memandang narasi laporan tahunan *Departement of Conservation* Selandia Baru (DOC) selama 23 tahun dan mereka menemukan bahwa sebagian besar pengungkapan memiliki fokus yang konsisten dengan kerangka filosofis ekologi yang mendalam atau *deep ecology*. Dilain sisi, Van Liempd dan Busch (2013), Rimmel dan Jonäll (2013) keduanya menemukan bahwa tingkat pelaporan keanekaragaman hayati yang dilakukan perusahaan-

perusahaan besar Belanda di Skandinavian, Denmark dan Swedia masih pada level yang sangat rendah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan keanekaragaman hayati menjadikan pelaporannya pun terkesan asal-asalan. Hal semacam itu juga sejalan dengan apa yang diungkapkan Atkins *et al.* (2014) bahwa pelaporan keanekaragaman hayati tampak parsial dan bias.

Pelaporan keanekaragaman hayati dapat dikatakan tergantung pada kemauan kemitraan kelembagaan dan lebih menggunakan pendekatan antroposentrisme dalam pengelolaannya dari pada pendekatan ekologis. Oleh karena itu maka akuntabilitas dan transparansi perlu ditegaskan atas dampak aktivitas korporasi dan bagaimana manajemen pengelolaan resiko keanekaragaman hayati. Seringkali dalam pelaporan, data keuangan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati tidak begitu terlihat, meskipun perusahaan menyebutkan pengeluaran besar yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang berhubungan dengan perlindungan dan peningkatan, akan tetapi tidak menyebutkan atau melaporkan angka-angka spesifik. Hal itu karena dilandasi oleh pemikiran yang tidak pro terhadap lingkungan, sehingga mengatur data ke dalam susunan tertentu, sebagaimana Atkins *et al.* (2014) mengutarakan hasil analisis yang disimpulkan bahwa pemilihan spesies dalam pelaporan keanekaragaman hayati didominasi oleh pendekatan antroposentrisme oleh institusi.

Studi tentang akuntansi keanekaragaman hayati sebagaimana yang dilakukan Jones (1996, 2003) yang masih berfokus pada pengembangan model inventarisasi keanekaragaman hayati, sementara Houdet *et al* (2012) dan Rimmel & Jonall (2013) yang menempatkan fokus pemahaman dampak

organisasi pada keanekaragaman hayati. Namun, penelitian terbaru lainnya menemukan penghitungan keanekaragaman hayati dalam konteks kepatuhan dengan sistem tata kelola yang lebih luas organisasi dan perusahaan beroperasi, seperti Schneider dan Samkin (2012) yang mengidentifikasi program legislatif di mana lembaga sektor publik harus mematuhi saat melaporkan keanekaragaman hayati dalam yurisdiksi hukum di Selandia Baru.

Studi tersebut telah menunjukkan bahwa pentingnya untuk memperluas lensa yang digunakan untuk penilaian akuntansi keanekaragaman hayati serta menempatkan pendekatan ekologis untuk penghitungan dan pelaporan keanekaragaman hayati yang tidak terbatas dalam pengungkapan-pengungkapannya melalui teknik akuntansi. Selain itu, peran aktor non-korporasi dalam mendelegitimasi dampak ekologis dan keanekaragaman hayati oleh organisasi, dimana sering dikaitkan dengan berbagai teknik alternatif akuntansi dan mekanisme pelaporan yang oleh Dey & Russel (2014) menyebutnya *external account*. *External account* digunakan oleh pemangku kepentingan seperti organisasi non-pemerintah, akademisi atau sektor publik (Dey *et al.*, 2010). *External accounting* dan pelaporan sering kali digunakan ketika tingkat kontroversi publik telah mengikuti dampak dari aktivitas manusia yang terorganisir terhadap lingkungan.

Studi tentang akuntansi keanekaragaman hayati terus mengalami perkembangan. Gaia dan Jones, (2017) mencoba mengeksplorasi penggunaan narasi dalam laporan keanekaragaman hayati sebagai sebuah mekanisme untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati. Kemudian menyelidiki apakah narasi untuk konservasi keanekaragaman hayati yang digunakan oleh dewan lokal Inggris sejalan dengan filosofi *deep ecology* atau

tidak. Hasil temuannya bahwa pentingnya keanekaragaman hayati belum sepenuhnya sejalan dengan filosofi *deep ecology*. Namun, Dewan lokal Inggris berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati dengan menyoroti nilai-nilai yang penting bagi pemangku kepentingan yang mampu berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati seperti pemilik tanah, penduduk, pengunjung, bisnis dan industri.

Sebuah kajian yang dilakukan oleh Syarifuddin dan Damayanti, (2019) yang bertujuan untuk mengungkap kesan yang disampaikan dalam laporan keanekaragaman hayati pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, mengungkapkan laporan keanekaragaman hayati dibuat untuk menarik investor dengan menunjukkan informasi terkait sumber daya alam lokal, sehingga memungkinkan investor untuk mengeksploitasi alam sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu, pelaporan keanekaragaman hayati perlu untuk ditinjau kembali terkait pengungkapannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Samkin *et al.* (2014) yang mengilustrasikan perkembangan pelaporan keanekaragaman hayati dan kerangka evaluasi untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah pengungkapan yang dilakukan oleh organisasi yang menjadi percontohan tersebut konsisten dengan perspektif ekologi yang dalam, seperti yang dicontohkan oleh undang-undang konservasi Selandia Baru. Hasilnya mengungkapkan bahwa pengungkapan keanekaragaman hayati memungkinkan pemangku kepentingan untuk menentukan tujuan, menilai implementasi mereka, dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi. Mayoritas pengungkapan laporan tahunan difokuskan pada penyajian informasi kinerja dan implementasi. Studi tersebut juga menemukan bahwa pengungkapan mayoritas mencerminkan pendekatan ekologi yang dalam. Ketegangan ekologis yang dalam dan dangkal

terlihat jelas di sejumlah pengungkapan, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi kawasan konservasi.

2.3. Urgensi Akuntansi Keanekaragaman Hayati

Setiap organisasi dan individu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pelaporan keanekaragaman hayati membuat terlihat apa yang sebelumnya tidak terlihat dan dengan demikian akan meningkatkan profil keanekaragaman hayati. Akuntansi keanekaragaman hayati adalah bagian penting dari penatagunaan organisasi dan legitimasi.

Kapitalisme dan pertumbuhan pada dasarnya merupakan orientasi dari akuntansi konvensional. Sombart (1979) menganggap bahwa pembukuan *double entry* merupakan pintu masuk kapitalisme. Maka tak terbantahkan lagi bahwa maraknya kerusakan lingkungan merupakan keharusan mengorbankan lingkungan demi kepentingan kapitalisme. perusahaan-perusahaan seringkali menggunakan lingkungan sebagai barang gratis dan merusak lingkungan demi meningkatkan laba.

Praktik akuntansi konvensional yang muaranya adalah laporan keuangan, merupakan jantung perusahaan, misalnya laporan laba rugi. Tentu bagi perusahaan selalu ingin labanya terlihat meningkat dari periode ke periode, hal seperti ini merupakan cikal bakal skandal akuntansi dan manipulasi laporan keuangan yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terabaikan (Sulistyo, 2015). Hal senada telah diungkapkan oleh Jones (2041) bahwa kerangka akuntansi dan ekonomi makro dan mikro saat ini, sebagaimana dalam akuntansi tradisional mengabaikan keanekaragaman hayati. Bahkan Triyuwono (2016) juga menyatakan bahwa praktik akuntansi konvensional tidak memiliki kemampuan untuk merefleksikan realitas non-

ekonomi perusahaan. Kefatalan perusahaan seringkali lingkungan dianggap sebagai aset yang dapat dieksploitasi untuk kapasitas produktifnya. Akibatnya adalah hal-hal seperti jenis tanah, kualitas, dan kegunaan tanah berdasarkan tujuan baik itu untuk pertanian atau yang lainnya tidak diperhitungkan.

Aspek penting dari kerangka teori untuk keanekaragaman hayati adalah kerangka itu perlu diungkapkan. Ini adalah dasar untuk setiap pelaporan keanekaragaman hayati yang berarti. Sangat penting bagi organisasi untuk melaporkan informasi ini terkait dengan pertanggungjawaban dan untuk tujuan konservasi. Aspek akuntabilitas pelaporan keanekaragaman hayati mencerminkan fakta bahwa organisasi beroperasi dalam masyarakat dan ada kebutuhan bagi mereka untuk mencari legitimasi masyarakat untuk kegiatan mereka. Organisasi harus bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada lingkungan dan kepada pemegang saham mereka. Oleh sebab itu, akuntansi keanekaragaman hayati sangat penting yang mencakup perhitungan numerik dan pembentukan inventarisasi alam habitat flora dan fauna. Selain itu, analisis kualitatif juga diperlukan terhadap kualitas keanekaragaman hayati melalui survei ekologis dan beberapa bentuk penilaian (Jones, 2014).

2.4. Aku adalah Alam

Manusia merupakan susunan organ yang memiliki tugas khas dan masing-masing organ saling bergantung satu sama lain. Selain organ dalam tubuh, manusia juga memiliki organ yang sangat vital di luar tubuh, yaitu alam. Alam adalah salah satu bentuk organ tubuh manusia yang menjalankan fungsinya di luar dari sistem pemerintahan organ dalam manusia.

Manusia sebagai mandataris Allah Swt harus mengenal dirinya, untuk mengenal alam bahwa mereka adalah satu dalam ikatan ciptaan, dan menyelami

alam penyucian diri untuk mengaktualkan aksi mendaulat nilai kesaksamaan demi manusia dan alam yang sentosa (Tjokroaminoto, 2019). Manusia dan alam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, manusia dan alam berasal dari pencipta yang maha Tunggal, dan alam mempersembahkan kehidupan kepada manusia, yang artinya adalah kehidupan ada bila alam ada. Maka mencintai alam adalah mencintai diri sendiri, dan menodai alam adalah bentuk kezaliman terhadap diri. Tindakan destruktif terhadap alam adalah menghancurkan peradaban manusia itu sendiri (solichin, 2019).

2.5. Ilmu Pengetahuan Dalam Sentimen Postmodernisme

Filsafat postmodernisme adalah antitesis atas modernisme. Modernisme merupakan aliran yang berpikir kritis-rasional dan konkret atas hal-hal yang konkret untuk membangun ilmu pengetahuan empiris-rasional terhadap kondisi konkret alam, manusia, dan sosial. Oleh karena itu, postmodernisme menggugat paham modernisme karena ilmu pengetahuan tidak dapat menguraikan perkembangan kondisi konkret kehidupan manusia dan social dan postmodernisme menggeleng terhadap metode yang terstruktur (*no methods and no rules of procedure*), anything goes adalah penitikberatan dalam metodenya (Triyuwono *et al.* 2016; Mulawarman, 2013).

Damayanti (2018: 54-55) menggambarkan bahwa postmodernisme adalah suatu *term* yang mengarah pada berbagai pengertian, definisi, atau segala sesuatu; semua berkembang bagaikan air mengalir mengikuti wadah, atau arus peristiwa di lapangan. Postmodernisme sendiri muncul ditengarai oleh modernisme yang mengandung makna kemajuan, gemerlap dan progresif. Akan tetapi, tidak dapat dibantah bahwa terdapat sisi gelap dari modernisme yang mengakibatkan kehidupan manusia kehilangan orientasi. Sebagaimana yang

dikatakan oleh Max Horkheimer, Ardono, dan Herbert Marcuse bahwa pencerahan tersebut melahirkan sebuah penindasan dan dominasi, di samping melahirkan kemajuan (Setiawan dan Sutdrajat, 2018)

Postmodern pada awal kemunculannya bukan menandakan suatu puncak budaya yang baru (seperti pada Pannwitz) sesudah dekadensi periode modern, melainkan sebaliknya yaitu suatu diagnosa mengenai kekendoran kultural sesudah ketinggian periode modern (Ismail, 2019).

Ideologi dalam modernisme memandang bahwa ilmu positif empiris adalah standar dari kebenaran yang perfek. Akibat pandangan yang objektif dan positif yang merupakan produk dari modernisme merenggut wibawa moralitas dan religious. Maka muncullah disorientasi moral dan religious menuntun kepada kekerasan, disorientasi hidup dan keterasingan. (Norris, 2003: 312). Pendekatan metodologis interpretasi anti obyektifitas dan dekonstruksi adalah bentuk pengakuan oleh para penganut postmodernisme dan meyakini bahwa postmodernisme adalah interpretasi tanpa batas (Soetriono dan Hanafie, 2007:31). Maka dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan sifatnya subjektif dalam pandangan postmodernisme dan tentu mengarah kepada konotasi bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai. Sementara modernisme selalu mendoktrin bahwa ilmu harus bebas nilai sebagai syarat untuk menganggap bahwa ilmu pengetahuan yang objektif (Jalaluddin, 2013: 67)

Setiawan dan Sudrajat (2018) menganggap bahwa postmodernisme bereaksi atas modernisme sebab ilmu pengetahuan yang ditawarkan menuntun kepada kehancuran. Modernisme tidak membawa kita pada kehidupan yang lebih layak dan bisa mengangkat harkat martabat manusia seperti apa yang telah dijanjikannya, namun malah sebaliknya. Postmodernisme berpandangan bahwa

harus dilakukan perombakan terhadap apa yang ditawarkan oleh modernisme dan juga harus dikaji ulang terlebih dahulu.

2.6. Sekelumit Dekonstruksi Derrida

Jacques Derrida adalah seorang tokoh filsafat yang berkebangsaan Prancis, yang terlahir pada tahun 1930 di Aljazair. Pada era 1950-an sampai 1970-an pergeseran secara gencar pemikiran modernitas ke postmodernitas dan dari strukturalisme menuju post- strukturalisme (Norris, 2016). Norris lebih lanjut menjelaskan mengenai pemikiran Derrida bahwa memang pada mulanya dekonstruksi adalah cara atau metode membaca teks. Adapun yang khas dalam cara baca dekonstruktif, yang dalam perjalanan selanjutnya sangat bermuatan filosofis adalah bahwa unsur-unsur yang dilacaknya untuk dibongkar, pertama-tama bukanlah soal inkonsistensi logis, argumen yang lemah, ataupun premis tidak akurat yang terdapat dalam teks sebagaimana yang biasa dilakukan oleh pemikiran modernisme, justru melainkan unsur yang secara filosofis menjadi penentu atau unsur yang memungkinkan teks tersebut menjadi filosofis.

Jacques Derrida menggambarkan dekonstruksi seperti menulis dengan kedua tangan, sebagai peristiwa, inskripsi atau percabangan tekstual. Dekonstruksi membuka ruang bagi perbedaan, konflik, ragam makna, diseminasi, dan konteks tanpa batas serta memusatkan diri pada permainan perbedaan tekstual. Dekonstruksi Derrida bertujuan untuk memahami teks, dengan bertolak dari teks itu sendiri sebagaimana teks itu menyingkapkan dirinya. Kemudian memahami teks secara non-logosentris. (Wibowo, dkk. 2009: 94)

Konsep dekonstruksi terlahir dari rahim filsafat postmodernisme yang kemudian dikembangkan oleh Jacques Derrida yang terlahir pada 15 Juli 1930 di

Aljazair. Derridean sebenarnya menampik untuk mendefinisikan dekonstruksi secara absolut. Sebab definisi adalah pembatasan, sementara dekonstruksi berupaya menerobos belenggu yang jauh melampaui, (Dharsono, 2015).

Bagi Derrida, dekonstruksi juga merupakan *writing*, dalam arti bukan hanya mengacu pada *writing* sebagai bentuk performatif, melainkan juga sebagai proses penyusunan pengertian, penyusunan pemahaman, dan pembentukan proposisi yang berlangsung secara terus menerus dalam aktivitas berpikir. Dengan kata lain, dekonstruksi bukan berupa teknik atau metode (Nurwahidin *et al.* 2016). Di dalam *Writing and Difference* yang dicuplik dari De (Re) Konstruksi Relasi Eksekutif- Legislatif karya Damayanti (2018: 73), bahwa Jacques Derrida menggambarkan sebuah dunia tanda dan dunia teks yang dilepaskan dari berbagai fondasi kebenaran, dalam rangka menciptakan kondisi tekstualitas atau pertanda yang dinamis atau produktif. Bagi Derrida, dunia penuh ketidakpastian sehingga tidak perlu ditentukan sebuah kebenaran. Ketidakpastian harus dirayakan dan digali lebih dalam makna-maknanya. Manusia berhak menafsirkan konteks kehidupannya secara bebas, guna menemukan makna baru sebagai alat untuk berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah.

Mulawarman, (2013) menegaskan bahwa Derrida sering menitikberatkan pada hal yang kecil. Kala hikayat misalnya dikisahkan dalam teks hal tersebut bukan menjadi sebuah problem. Tetapi yang kemudian perlu dipertimbangkan kembali adalah makna lanjutan dekonstruksi dari Derrida, mengenai dekonstruksi yang tidak pernah diarahkan pada kepastian kebenaran dan akan terjadi dekonstruksi terus menerus. Dekonstruksi tidak pernah diarahkan kepada suatu kepastian kebenaran. Derrida melakukan dekonstruksi untuk dekonstruksi selanjutnya yang tidak akan pernah putus.

2.7. Suku Kajang dan Alam

Kampanye kesadaran terhadap lingkungan yang hari ini telah dibumikan oleh para aktivis lingkungan membawa dampak yang sangat positif bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Upaya melestarikan lingkungan dipahami sebagai kesanggupan manusia untuk mengakui keterbatasannya bahwa ia tidak memiliki kemampuan secara utuh dalam memahami dunia dan seluruh unsurnya. Oleh karena itu, sebagai insan di muka bumi seyogyanya bekerja sama dengan lingkungan untuk menuntun hidup secara bersama menuju kesejahteraan yang paripurna. Hal tersebut telah memberikan contoh perilaku yang menghargai hak hidup setiap makhluk sebagai subjek yang otonom dan prestius dalam dunia yang aktual terstruktur (Darmawati, 2002).

Di tengah maraknya aksi pembalakan liar oleh oknum tak bertanggung jawab akhir-akhir ini, melihat praktek hidup Suku Kajang atau yang juga disebut masyarakat adat Amma Toa dalam melestarikan kawasan hutannya seolah-olah memberi secercah harapan bagi kelestarian lingkungan alam (Suriani, 2006). Masyarakat adat Kajang sangat berpegang teguh pada ajaran *Pattuntung*, ajaran ini memiliki pandangan dalam menjalani hidup ini manusia harus mampu mengenal Tuhan, dan mampu mengenal manusia, dan alam atau lingkungan tempat tinggalnya (Manda, 2007)

Talassa' kamase-mase dalam *passang* telah menjadi prinsip hidup masyarakat adat Kajang. Masyarakat Kajang tidak berharap lebih dari kebutuhannya, meskipun jika dilihat sumber daya alam yang dimiliki oleh Tanah Toa sangat mendukung masyarakatnya untuk hidup mewah, tetapi masyarakat Kajang lebih memilih hidup sederhana selaras dengan alam, dengan menjaga kekayaan alam untuk dilestarikan, bukan untuk

dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Prinsip *Talassa' Kamase-mase*, menjadi bekal bagi masyarakat Kajang untuk mengabdikan pada *Turi A'ra'na* (Tuhan), sebagai pedoman hidup, sehingga masyarakat Kajang hanya memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan saja, dan menekan semua keinginan yang dianggap dapat merusak eksistensi alam lingkungan.

2.8. Kerangka Pemikiran

Telah banyak literatur yang berbicara tentang pengelolaan lingkungan dengan mengadopsi paradigma antroposentrisme yang memaksa etika lingkungan tidak lagi memiliki tempat, sehingga dampaknya langsung kepada keberlangsungan keanekaragaman hayati. Faktor eksplorasi, eksploitasi, pencemaran, perburuan, perdagangan dan perusakan lingkungan, muncul karena ketiadaan nilai-nilai moralitas manusia dalam berhubungan dengan alam, telah menjadi *mainstream* penyebab krisis lingkungan dan alam kehilangan fungsi ekologisnya sehingga keanekaragaman hayati berada dalam fase kepunahan (Saifullah, 2002; Fios, 2013; Nahdi, 2008; Kusmana & Hikmat, 2015).

Pembebasan perlu dilakukan atas sandraan ruh-ruh jahat kapitalisme, liberalisme, dan sekularisme serta memahami akan fungsi-fungsi lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia, untuk penyucian jiwa dan memahami diri demi membendung mesin hasrat dan memperlakukan lingkungan secara adil. Manusia awam maupun sufi melakukan tahapan penyucian jiwa dalam tasawuf akhlak semata-mata atas wujud kecintaan pada Allah, bukan sengaja berusaha menapak surga-Nya (Sulistianawati, dkk. 2020). Oleh sebab itu, manusia mesti menyadari alam memberikan kekayaannya sebagai bentuk ibadah kepada sang maha cipta, dan manusia menerimanya juga harus semata-mata beribadah kepada Ilahi.

Mendekonstruksi laporan keanekaragaman hayati untuk menghadirkan suatu nilai baru yang mungkin belum terungkap. Sehingga dalam laporan keanekaragaman hayati menjadi suatu bahan pertimbangan yang kuat sebelum lingkungan diambil kekayaannya, untuk itu perlu suatu nilai yang mencerminkan laporan keanekaragaman hayati yang ideal. Nilai yang di maksud dalam penelitian ini yaitu nilai kearifan suku Kajang sebagai bangunan dalam mendekonstruksi laporan keanekaragaman hayati.

Ilustrasi 2.1



Sumber: Modifikasi Peneliti